

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR (KJP) PLUS DI SMP NEGERI 227 JAKARTA SELATAN

Dewanda Mufti¹, Puji Astuti², Dewi Erowati³
Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465497, Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id/> Email: fidip@undip.ac.id
dwndamft@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan pondasi penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. DKI Jakarta sebagai daerah otonom memiliki wewenang untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan daerahnya, termasuk dalam hal pemerataan pendidikan. Mengingat angka kemiskinan dan angka putus sekolah di DKI Jakarta yang cukup tinggi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjamin setiap warganya mendapatkan kesempatan dalam mengakses pendidikan terlebih anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan biaya. Program Kartu Jakarta Pintar hadir untuk membantu masyarakat kurang mampu untuk bisa menuntaskan pendidikan hingga tamat SMA/SMK Sederajat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas oleh Campbell J. P yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran program, dan kepuasan terhadap program. Pada indikator keberhasilan program, terdapat 3 (aspek) yang dilihat, yaitu pencapaian tujuan program, sosialisasi program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah berjalan cukup efektif dalam indikator keberhasilan program dan kepuasan terhadap program. Dalam aspek pencapaian tujuan, SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah hampir mencapai tujuan program KJP Plus secara keseluruhan dan mendukung terselenggaranya wajib belajar 12 tahun. Sosialisasi dan pemantauan juga telah dilakukan dengan baik dan maksimal. Kepuasan dari penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 dikarenakan program KJP Plus dapat memenuhi kebutuhan penerimanya, baik kebutuhan pendidikan maupun pangan anak. Kelengkapan fasilitas penunjang kebutuhan yang dekat dan kemudahan akses juga berpengaruh terhadap kepuasan penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan karena tidak semua sekolah dekat dengan fasilitas dan akses tersebut. Akan tetapi, pada indikator keberhasilan sasaran belum bisa dikatakan efektif dikarenakan masih terdapat sasaran program yang tergolong mampu. Sasaran program menjadi hal yang harus lebih diperhatikan pemerintah dan diperlukan peninjauan ulang terhadap pelaksanaannya agar manfaat program dapat diterima secara maksimal oleh sasaran program, yaitu masyarakat kurang mampu.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendidikan, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus

ABSTRACT

Education is an important fundamental in supporting the sustainability of development in a country. This is because the implementation of quality and equitable education can produce high-quality human resources, which is essential for the growth and prosperity of a country. As an autonomous region, DKI Jakarta holds the authority to manage the implementation of its regional education, including in terms of education equity. Considering the high rates of poverty and school dropouts in DKI Jakarta, the Provincial Government of DKI Jakarta is committed to ensuring that every citizen has the opportunity to access education, especially children from underprivileged families who have limited costs. The Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus is present to help underprivileged families to be able to complete their education up to the equivalent of senior high school (SMA/SMK Sederajat). The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of the Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus program at SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. This study used a descriptive qualitative approach with data collection methods through interviews and documentation. The analysis in this study used the theory of effectiveness by Campbell J. P which consists of 3 (three) indicators, namely program success, program target success, and program satisfaction. In the program success indicator, there are three aspects that are examined: program goals achievement, program socialization, and program monitoring. The result of the study showed that the implementation of the KJP Plus program at SMP Negeri 227 Jakarta Selatan has been quite effective in terms of program success and program satisfaction indicators. In the aspect of program goals achievement, SMP Negeri 227 South Jakarta has nearly achieved the overall goals of the KJP Plus program and supports the implementation of the mandatory 12-year education. Socialization and monitoring program aspects have also been carried out effectively and maximally. The satisfaction of KJP Plus recipients at SMP Negeri 227 is due to the program's ability to meet program target needs, both educational and nutritional. The availability of supporting facilities nearby and ease of access also had an impact on the satisfaction of KJP Plus recipients at SMP Negeri 227, as not all schools are close to such facilities and accessibility. However, the program target success indicator hasn't been effective yet, as there are still program targets that are considered financially capable. The program target is something that the government must pay more attention to and require a review of its implementation to ensure that the benefits of the program can be maximally received by the program target, namely the underprivileged community.

Keyword: Effectiveness, Education, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Program

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan pembangunan di suatu negara. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula, yang kelak menjadi pondasi penting dalam setiap proses

pembangunan. Dengan kualitas diri yang diperoleh melalui pendidikan, suatu bangsa sanggup hidup dengan tangguh dalam masyarakat global yang ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kompetisi (Tilaar, 1999:34).

Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan setiap warga negaranya berhak memperoleh

kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas secara adil dan merata. Akan tetapi, tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan, salah satu faktornya adalah kemiskinan.



Angka kemiskinan DKI Jakarta dalam 3 tahun terakhir (2020-2022) mengalami kenaikan hingga mencapai angka di atas 4.5, di mana sebelumnya angka kemiskinan DKI Jakarta di bawah atau sama dengan 4. Kemiskinan menyebabkan penduduk miskin yang memiliki keterbatasan sumber daya sulit untuk mencapai akses-akses yang ada, salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Kemiskinan berdampak pada keterbatasan masyarakat untuk mengakses pendidikan dan fasilitasnya karena terhalang biaya, bahkan sampai ada masyarakat yang harus putus sekolah. Keterbatasan masyarakat inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor tingginya angka putus sekolah khususnya di DKI Jakarta, karena meskipun sebagian besar sekolah negeri sudah tidak dipungut

biaya lagi, masih banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar pendidikan untuk anaknya karena keterbatasan biaya yang tidak sebanding dengan banyaknya kebutuhan pendidikan yang ditujukan untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah.

Oleh karena itu, dalam rangka menjamin setiap warganya mendapatkan kesempatan dalam mengakses penyelenggaraan pendidikan terlebih anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki keterbatasan biaya, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

Program KJP Plus dilaksanakan di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu masyarakat yang tergolong kurang mampu untuk tetap bisa melanjutkan pendidikannya, salah satunya SMP Negeri 227 Jakarta Selatan yang merupakan satuan pendidikan milik Pemprov DKI Jakarta di wilayah Jakarta Selatan yang turut melaksanakan program KJP Plus.

No.	Tahun	Tahap 1	Tahap 2
1.	2019	-	424
2.	2020	403	441
3.	2021	456	473
4.	2022	485	523
5.	2023	499	-

Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, bahkan cenderung mengalami peningkatan tiap waktunya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, jumlah peserta didik SMP Negeri 227 pada tahun ajaran 2022/2023 adalah 740 siswa. Dari total 740 tersebut, berdasarkan tabel 1.3 total penerima KJP Plus tahun 2023 berjumlah 499 siswa, yang berarti lebih dari 50% siswa di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan merupakan penerima KJP Plus. Tingginya jumlah penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta memberikan gambaran tingginya antusiasme masyarakat terhadap program KJP Plus.

SMP Negeri 227 Jakarta Selatan memiliki letak cukup strategis dan dekat dengan fasilitas penunjang kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pangan peserta didik penerima KJP Plus, seperti pasar ATM Bank DKI yang dapat digunakan penerima KJP Plus untuk melakukan transaksi tarik tunai, toko khusus kebutuhan sekolah "Romi Jaya", dan "Food Station". Selain itu, terdapat transportasi umum berupa angkutan kota (angkot) jalur 05 yang berada di rute yang melewati sekolah dan tempat-tempat fungsional bagi para penerima KJP Plus.

Pemberian bantuan sosial biaya pendidikan personal untuk peserta didik di DKI Jakarta melalui program KJP Plus ini

tentu diminati oleh masyarakat DKI Jakarta mengingat jumlah penerimanya yang sangat banyak. Akan tetapi, dalam pelaksanaan suatu program tidak terlepas dari permasalahan yang ada. Dalam penelitian oleh Sukriyandi pada tahun 2017 yang meneliti terkait efektivitas program KJP pada jenjang SMA dan SMK di Kecamatan Kebon Jeruk, ditemukan siswa penerima KJP yang membelanjakan dana KJP di luar kebutuhan sekolah dan mencairkannya ke dalam bentuk tunai tanpa membeli kebutuhan sekolah.

Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan oleh Handayani, Trisni dkk (2020) di SD Negeri Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, hasil temuan menunjukkan masih banyak siswa penerima KJP Plus yang berasal dari keluarga yang berkecukupan, bahkan terdapat orang tua siswa penerima KJP Plus yang memiliki penghasilan yang sama dengan orang tua siswa bukan penerima KJP Plus, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan KJP Plus belum tepat sasaran.

Ditemukan pula kasus penyalahgunaan dana KJP Plus untuk membeli barang mewah atau kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak menunjang proses pembelajaran siswa penerima KJP Plus dan tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Pergub DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 (Muluk, Irbah, Bagastama, dan Belakang,

2019:7). Meskipun ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh siswa penerima KJP Plus ataupun orang tua, sayangnya pihak sekolah tidak memberikan sanksi tegas kepada siswa ataupun orang tua penerima KJP Plus yang melakukan pelanggaran. (Pertiwi, Yoana Mega dan Aloysius Rengga, 2016:10).

Penelitian yang dilakukan oleh Anisah dan Etty Soesilowati (2018) melihat efektivitas Program KJP pada penelitian ini melalui 2 indikator, yaitu keberhasilan program dan keberhasilan sasaran program. Temuan dari penelitian ini menunjukkan keberhasilan program melalui tercapainya tujuan program KJP yang dilihat dari indikator rata-rata lama sekolah, rasio guru terhadap murid, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang menunjukkan peningkatan. Indikator ketepatan sasaran program KJP dinilai sudah cukup efektif, yaitu dengan persentase peserta didik 80% tepat sasaran dan 20% tidak tepat sasaran.

Berdasarkan uraian peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa tingginya perhatian masyarakat DKI Jakarta terhadap program KJP Plus turut memunculkan masalah yang berkaitan dengan program ini. Dengan didukung oleh data banyaknya jumlah penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan yang relatif banyak dan cenderung meningkat tiap tahunnya serta letak sekolah yang berada di tempat

strategis dan dekat dengan fasilitas-fasilitas penunjang kebutuhan siswa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengkaji lebih lanjut mengenai efektivitas program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Peneliti melihat fenomena yang ada di lapangan yang sesuai dengan masalah penelitian, yang kemudian akan ditelaah dan diuraikan ke dalam kata-kata yang akan membentuk suatu kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 227 Jakarta, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Adapun subjek dari penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* di mana subjek diambil dengan pertimbangan tertentu, seperti orang yang memiliki informasi terkait permasalahan penelitian sehingga akan memudahkan peneliti dalam memperoleh data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah staf UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Kasatlak Pendidikan Kecamatan Pasar Minggu, guru dan operator KJP Plus SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, siswa dan orang tua penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, siswa bukan penerima KJP Plus, Pendamsos Kelurahan Pejaten Barat, serta

ketua RT di sekitar SMP Negeri 227 Jakarta Selatan.

Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Untuk pengumpulan datanya sendiri menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan terakhir verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dalam penelitian ini menggunakan indikator efektivitas oleh Campbell J. P yang terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu keberhasilan program, keberhasilan sasaran program, dan kepuasan terhadap program.

1. Keberhasilan Program

Efektivitas suatu program dapat dilihat melalui pelaksanaan dari program itu sendiri, sehingga keberhasilan program dapat ditinjau melalui bagaimana program tersebut dijalankan. Penelitian ini menggunakan aspek pencapaian tujuan, sosialisasi program, dan pemantauan program dalam melihat efektivitas pada indikator keberhasilan program.

a. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan suatu program dapat dikatakan sebagai dasar yang melatarbelakangi

adanya program tersebut, sehingga tercapainya tujuan dalam suatu program merupakan aspek yang sangat penting dan diperhitungkan dalam keberhasilan pelaksanaan suatu program.

1) Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan secara Adil dan Merata

Dikatakan akses pendidikan secara adil dan merata karena diharapkan seluruh siswa di DKI Jakarta dapat mengenyam dan mampu menuntaskan pendidikannya, di luar bagaimana pun kondisi ekonominya. Program KJP Plus inilah yang kemudian hadir untuk membantu dan mendukung masyarakat kurang mampu agar tetap bisa bersekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pasar Minggu, peneliti mengetahui bahwa program KJP Plus sejalan dengan jalur zonasi dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang artinya penerimaan siswa di sekolah negeri di DKI Jakarta lebih mengutamakan calon siswa yang berdomisili di sekitar lokasi sekolah. Tercapainya tujuan program KJP Plus ini didukung dengan sistem PPDB jalur zonasi yang mengutamakan peserta didik yang berdomisili di lingkungan sekitar satuan pendidikan untuk bisa bersekolah di dekat tempat tinggalnya.

SMP Negeri 227 Jakarta Selatan juga merasakan dampak dari sistem PPDB dan program KJP Plus dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata, di mana siswa dari keluarga kurang mampu yang dulunya tidak bisa bersekolah di sekolah unggulan kini bisa mendaftar di sekolah mana pun yang diinginkannya selama memenuhi persyaratan penerimaan di sekolah tersebut. Melalui hasil wawancara peneliti dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah berhasil mencapai tujuan program KJP Plus dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata. Pihak sekolah dipastikan menerima calon siswa di jalur manapun, termasuk jalur zonasi dan afirmasi dikarenakan hal ini sudah ketentuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tujuan program KJP Plus dalam rangka meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata sudah tercapai karena pelaksanaan program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pergub tentang KJP Plus.

Beberapa informan menyatakan bahwa jalur zonasi dan afirmasi dalam sistem PPDB sangat menguntungkan dan terasa manfaatnya karena rumahnya berdekatan dengan beberapa SD, SMP, hingga SMA, sehingga anak-anaknya bisa lolos PPDB

dengan jalur zonasi ataupun afirmasi termasuk ketika mendaftar ke SMP Negeri 227 Jakarta beberapa waktu lalu. Ditambah dengan status sebagai penerima KJP Plus untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anaknya, kini orang tua siswa sudah merasa terjamin dalam menerima layanan pendidikan dan masyarakat tidak kesulitan untuk mencari serta mendapatkan sekolah. Hasil wawancara tersebut didukung oleh pernyataan informan berikut ini.

2) Menjamin Kepastian Mendapatkan Layanan Pendidikan

Tujuan ini dimaksudkan agar penerima KJP Plus bisa menuntaskan jenjang pendidikan yang sedang dijalani dan melanjutkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pasar Minggu, diketahui bahwasanya tujuan program KJP Plus dalam menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan adalah dengan adanya kesinambungan dalam program KJP Plus itu sendiri, di mana ketika anak tersebut sudah ditetapkan sebagai penerima program KJP Plus dari jenjang SD, maka layanan pendidikannya akan tetap terjamin sampai jenjang SMP dan SMA/SMK Sederajat. Selama penerima tidak melakukan pelanggaran, maka ia tetap berhak mendapatkan bantuan

KJP Plus dan menerima layanan pendidikan yang berkelanjutan.

Penjelasan Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Pasar Minggu pun selaras dengan pelaksanaannya di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan., di mana sebagian besar siswa penerima KJP Plus merupakan penerima KJP Plus lanjutan. Program KJP Plus tidak akan terputus selama dianggap masih layak dianggap sebagai penerima program dan tidak melakukan pelanggaran.

Dari hasil wawancara peneliti dengan penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, dapat diketahui bahwa sebagian besar penerima KJP Plus yang saat ini sedang mengenyam pendidikan di SMP sudah menjadi penerima program atau menerima bantuan KJP Plus sejak duduk di bangku sekolah dasar dan belum pernah ada yang terputus bantuannya karena tidak ada yang melakukan pelanggaran.

Selain itu, melalui penelitian yang sudah dilakukan, ditemukan upaya yang dilakukan SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dalam mencapai tujuan program KJP Plus, yaitu menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan. Pihak SMP Negeri 227 Jakarta Selatan memastikan bagi siswa yang sebelumnya sudah mendapatkan KJP Plus untuk tetap bisa melanjutkan bantuan yang sudah didapatkannya tersebut agar

mereka bisa menuntaskan pendidikan tanpa ada kendala biaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikannya. Upaya tersebut dilakukan dengan cara pihak sekolah secara aktif menginformasikan kepada siswa penerima KJP Plus untuk melakukan perpanjangan bantuan melalui pengumpulan berkas yang dilakukan setiap pembukaan tahap I dan II KJP Plus. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan terus memastikan siswa yang namanya tercantum sebagai calon penerima tahap berikutnya untuk segera mengumpulkan berkas yang dibutuhkan agar tahapan selanjutnya bisa diproses.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa penerima KJP Plus kelas 9A, benar adanya bahwa pihak sekolah selalu mengingatkan siswa yang namanya tercantum sebagai calon penerima KJP Plus tahap berikutnya untuk melakukan pemberkasan dan segera mengumpulkannya ke ruang tata usaha (TU).

3) Meningkatkan Mutu Layanan dan Kualitas Hasil Pendidikan

Dari hasil wawancara, didapatkan informasi bahwasanya SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah melakukan upaya maksimal agar mutu layanan di sekolah selalu baik. Hal yang dilakukan adalah pihak selalu terbuka dan siap melayani

apabila ada siswa dan orang tua penerima KJP Plus yang membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut yang dilakukan secara langsung dengan bertemu di sekolah ataupun secara tidak langsung yaitu melalui chat di WhatsApp. Pelayanan diberikan secara maksimal kepada seluruh pihak tanpa pandang bulu dan sikap membedakan, baik itu siswa penerima KJP Plus maupun siswa bukan penerima KJP Plus.

Penjelasan di atas kemudian diperkuat dengan wawancara peneliti dengan siswa penerima dan bukan penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan yang di mana pihak sekolah sudah melakukan pelayanan secara maksimal kepada seluruh siswa baik yang penerima KJP Plus maupun bukan.

Selanjutnya, peneliti berusaha mencoba melihat kualitas hasil pendidikan di SMP Negeri 227 Jakarta. Dengan adanya program KJP Plus untuk siswa kurang mampu, kebutuhan dasar pendidikan siswa dapat terpenuhi menggunakan dana KJP Plus yang diberikan setiap bulannya dan hal ini diharapkan juga berpengaruh ke hasil pendidikan siswa penerima KJP Plus. Melalui hasil wawancara, guru-guru di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan melihat bahwa kebutuhan dasar pendidikan siswa penerima KJP Plus sudah cukup terpenuhi, yang artinya dana KJP plus mampu membuat penerimanya membeli

perlengkapan sekolah yang dibutuhkan guna mendukung proses pembelajaran. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan oleh program KJP ini, pihak sekolah tidak menemukan hal-hal yang mengganggu kegiatan belajar mengajar dikarenakan terdapat siswa yang tidak memiliki perlengkapan sekolah. Untuk kualitas hasil pendidikan di SMP Negeri 227 Jakarta terbilang sudah cukup baik mengingat terdapat siswa penerima KJP Plus yang berprestasi sebagaimana yang peneliti ketahui melalui hasil wawancara dengan beberapa wali kelas dan dijelaskan di tujuan program KJP Plus berikutnya.

4) Menumbuhkan Motivasi bagi Peserta Didik untuk Berprestasi dan Menuntaskan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Diikuti

Upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 227 Jakarta Selatan adalah dengan memberikan motivasi kepada siswa melalui pembinaan wali kelas di setiap kelas. Wali kelas biasanya akan menyisihkan waktu pada saat jam mata pelajaran untuk memberikan nasihat kepada siswa di kelasnya untuk rajin belajar, khususnya bagi siswa yang sudah mendapatkan bantuan pendidikan melalui program KJP Plus. Wali kelas juga kerap menumbuhkan kesadaran siswa mengenai pentingnya pendidikan.

Siswa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan mengaku adanya pembinaan oleh wali kelas ini cukup berpengaruh terhadap motivasi belajar mereka karena pembinaan dimulai sejak siswa duduk di bangku kelas 7 dan dilakukan cukup sering. Selain itu, siswa juga menjadi lebih semangat bersekolah karena sudah mendapatkan bantuan pendidikan melalui program KJP Plus. Dengan dana KJP Plus yang cair setiap bulannya, penerima dapat membeli keperluan sekolah yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Kebutuhan dasar pendidikan yang tercukupi pun dapat menciptakan suasana belajar siswa menjadi lebih nyaman dan kondusif, hal ini membuat motivasi belajar siswa penerima KJP Plus turut meningkat.

Melalui penelitian yang sudah dilakukan, peneliti juga menemukan cukup banyak siswa penerima KJP Plus yang berprestasi di bidang akademik ataupun non-akademik. Beberapa di antara mereka ada yang mendapatkan ranking di kelas atau mendapatkan juara di berbagai perlombaan. Banyak siswa termotivasi untuk terus berprestasi salah satu alasannya adalah untuk mempermudah mereka di PPDB ketika akan masuk ke SMA/SMK Sederajat nantinya. Hal ini dikarenakan apabila mereka memiliki prestasi, mereka akan mendapat persentil nilai tambahan

yang akan mendukung mereka pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Untuk prestasi akademik sendiri, biasanya akan dilihat melalui nilai rapot siswa dan pengalaman dalam berorganisasi. Dari hasil wawancara dengan wali kelas, tidak sedikit siswa penerima KJP Plus yang aktif di kelas, memiliki motivasi belajar yang bagus, rajin belajar dan mengerjakan tugas, aktif di organisasi seperti MPK/OSIS, menjadi ketua kelas, hingga mendapat ranking 10 besar. Berikutnya untuk prestasi non-akademik bisa didapatkan melalui sertifikat kejuaraan yang diikuti oleh siswa. Menurut wali kelas yang merangkap sebagai pengawas ekskul tari, yaitu Serapin, siswa yang mengikuti ekskul tari mayoritas merupakan penerima KJP Plus dan mereka sudah memiliki kesadaran untuk memupuk prestasi dengan menjuarai perlombaan yang kelak bisa digunakan untuk tambahan persentil nilai pada saat PPDB SMA/SMK Sederajat.

5) Mendukung Terselenggaranya Program Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Pihak sekolah khususnya wali kelas sudah mewanti-wanti siswa sejak awal kelas 7 untuk bisa memperoleh nilai bagus dan mempertahankan nilai rapot yang akan digunakan pada saat PPDB SMA/SMK Sederajat. Wali kelas juga selalu mengingatkan siswa untuk mulai

merencanakan studi mereka setelah lulus dari SMP karena nilai rapot akan sangat menentukan sekolah mereka selanjutnya. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan berusaha untuk menumbuhkan motivasi belajar siswanya sejak awal agar siswa dapat mempersiapkan masa depannya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara bersama Alam selaku wali kelas 9E, diketahui bahwa setiap wali kelas melakukan pembinaan mulai dari kelas 8 dan pendataan di kelas 9 kepada siswa SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, baik penerima KJP Plus maupun bukan penerima KJP Plus

Dengan upaya yang terus dilakukan oleh sekolah untuk menumbuhkan motivasi siswa agar terus berprestasi dan melanjutkan pendidikannya ditambah dengan kesadaran siswa-siswa untuk berprestasi menjadi modal yang sangat kuat dalam proses pencapaian tujuan KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Sebagian besar siswa penerima KJP Plus juga sudah mengetahui mengenai pentingnya pendidikan. Kesadaran mereka untuk mendapatkan tambahan nilai melalui prestasi yang mereka miliki menandakan bahwa mereka memang sudah berniat untuk melanjutkan pendidikan ke tahap selanjutnya, yaitu SMA/SMK Sederajat di mana hal ini mendukung upaya menuntaskan pendidikan sampai dengan tamat SMA/SMK Sederajat atau

terselenggaranya program wajib belajar 12 tahun. Sebagian besar siswa sudah memiliki beberapa sekolah tujuan, di antaranya SMA 28, SMA 55, SMK 8, SMK 47, SMK 57, dan lain-lain. Beberapa di antaranya sudah tahu jurusan apa yang akan dipilih ketika SMA/SMK nanti, bahkan terdapat siswa yang sudah memiliki rencana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa siswa penerima KJP Plus, ditemukan bahwa alasan mereka untuk melanjutkan pendidikan beberapa di antaranya karena siswa sudah memahami betul pentingnya pendidikan yang dapat menjadi bekal mereka di masa depan. Siswa berharap dengan pendidikan, pengetahuan mereka menjadi lebih luas dan memiliki masa depan yang cerah. Beberapa siswa sudah mengerti mengenai persyaratan di dunia kerja di mana tingkat pendidikan pada syarat yang diminta biasanya untuk tingkat SMA/SMK Sederajat. Oleh karena itu, siswa setidaknya ingin menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA/SMK Sederajat agar memenuhi persyaratan dalam dunia kerja. Selain itu, terdapat siswa yang ingin meniti karir sebagai atlet, pelatih, dan tentara, yang juga mengharuskan calonnya untuk menamatkan pendidikan minimal SMA/SMK Sederajat. Terakhir, alasan

yang paling sering disebutkan siswa adalah karena mereka ingin membahagiakan dan mengangkat derajat orang tua mereka.



Grafik di atas menunjukkan lulusan SMP Negeri 227 Jakarta Selatan pada tahun ajaran 2022/2023. Sebagian besar siswa melanjutkan pendidikannya ke SMK negeri ataupun swasta. Dari total siswa yang berjumlah 272 anak, 63.6% atau 173 siswa bersekolah di SMK negeri dan swasta, sedangkan sisanya yaitu 36.4% atau 99 siswa melanjutkan pendidikan ke SMA negeri dan swasta.

6) Mendorong Anak Tidak Sekolah (ATS) agar Kembali Mendapatkan Layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Tertentu

Dari hasil wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, diketahui bahwa SMP Negeri 227 Jakarta Selatan tidak pernah diminta untuk menerima ATS untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Begitu pun dengan kasus putus sekolah di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, di mana sekolah tidak pernah mengeluarkan siswa khususnya siswa penerima KJP Plus. Apabila ada siswa yang terbilang cukup nakal, maka

pihak sekolah akan melakukan pembinaan secara ekstra agar siswa tersebut menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi. Segala upaya dilakukan oleh pihak sekolah agar siswa yang membutuhkan perhatian khusus tetap bisa bersekolah hingga siswa tersebut berhasil menuntaskan pendidikannya.

Pernyataan informan di atas mengenai tidak adanya ATS di wilayah Kelurahan Pejaten Barat dan SMP Negeri 227 Jakarta Selatan kemudian diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan siswa dan orang tua siswa SMP Negeri 227 Jakarta Selatan. Baik siswa maupun orang tua siswa menyatakan bahwa tidak pernah ada ATS yang melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan atau pun siswa yang dikeluarkan dari sekolah.

b. Sosialisasi Program

Keberhasilan suatu program didukung oleh pelaksanaan sosialisasi programnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi program merupakan upaya yang dilakukan pihak pelaksana dalam menyampaikan informasi terkait program tersebut, sehingga informasi dapat tersampaikan dan dipahami oleh sasaran program. Sosialisasi program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dari pihak sekolah kepada siswa dan orang tua dan/wali siswa terkait dengan program KJP Plus,

khususnya mengenai perpanjangan bantuan dengan pengajuan berkas. Pengajuan berkas yang dimaksud adalah ketika siswa yang namanya keluar sebagai calon penerima KJP Plus di tahap yang baru, maka mereka harus mengumpulkan berkas untuk melakukan perpanjangan terhadap bantuan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan melaksanakan sosialisasi sesuai dengan yang sudah ditetapkan, yaitu 2 (dua) kali dalam satu tahun atau 1 (kali) dalam satu semester karena pelaksanaan program KJP Plus sendiri terdiri dari tahap I dan tahap II.

Untuk sosialisasi yang dilakukan secara langsung, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan biasanya menyampaikan informasi terkait pemberkasan melalui speaker saat upacara dan speaker kelas. Cara lain yang digunakan oleh sekolah dalam upaya menyebarkan informasi terkait KJP Plus kepada sasaran program adalah dengan menempelkan kertas yang berisi nama-nama calon penerima KJP Plus sementara di mading sekolah. Setelah itu pihak sekolah akan mengumumkan kepada siswa bahwa informasi mengenai calon peserta KJP Plus sementara sudah ada di mading dan siswa dipersilahkan untuk mengecek nama masing-masing. Selain di mading,

nama calon penerima KJP Plus sementara juga akan di-*share* ke grup.

Sedangkan untuk sosialisasi tidak langsung atau secara *online* biasa dilakukan di grup Telegram. Sejauh ini penyampaian dan pertukaran informasi di grup Telegram berjalan dengan aman dan lancar. Akan tetapi, apabila menjelang batas pengajuan masih terdapat siswa yang belum melakukan pemberkasan, maka pihak sekolah akan menyampaikan kepada yang bersangkutan. Biasanya akan dibuat pengumuman atau siswa tersebut dipanggil oleh pihak sekolah dan dihimbau untuk segera melakukan pemberkasan.

c. Pemantauan Program

Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan program, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan serta upaya penyelesaiannya. Kegiatan ini diperlukan agar pelanggaran bisa segera diketahui dan dapat ditindaklanjuti.

1) Pemantauan terhadap Pelanggaran

Upaya SMP Negeri 227 Jakarta Selatan dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran oleh siswa penerima KJP Plus adalah dengan menghimbau siswa untuk menaati aturan yang berlaku dan tidak berperilaku yang tidak benar jika tidak ingin KJP Plusnya diblokir. Pihak sekolah selalu memperingati siswa akan hak dan

kewajibannya, seperti rajin masuk sekolah dan mengerjakan tugas, tidak melanggar tata tertib, dan lain sebagainya. Himbauan ini biasanya dilakukan oleh kepala dan wakil kepala sekolah ketika upacara ataupun melalui *speaker* sekolah. Selain itu, wali kelas sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan sasaran program baik itu siswa maupun orang tua/wali siswa juga mengingatkan hal tersebut secara langsung di kelas dan di grup WhatsApp kelas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tidak ada SOP baku ataupun metode khusus bagi sekolah dalam melakukan pemantauan program KJP Plus. Akan tetapi, perilaku siswa bisa dilihat selama kegiatan belajar mengajar (KBM) atau melalui catatan kehadiran siswa, catatan pelanggaran, catatan guru BK ataupun pemantauan dari wali kelas. Kemudian sekolah akan memastikan kembali apakah anak yang bermasalah merupakan anak penerima KJP Plus atau bukan.

Pemantauan program yang dilaksanakan di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan memiliki penyelesaian dengan tingkatan pembinaan tergantung dengan kesalahan yang dilakukan oleh siswa, mulai dari pelanggaran kecil, sedang, hingga berat. Pelanggaran kecil biasanya ditangani oleh pihak yang pertama menemukan masalah. Namun, apabila siswa tersebut

kembali melakukan kesalahan, maka dilakukan pembinaan ke tingkat selanjutnya. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan juga sudah bekerja sama dengan RT dan RW di sekitar sekolah untuk ikut mengawasi dan memantau apabila ada siswa KJP Plus yang melakukan pelanggaran dan diketahui oleh pihak RT dan RW. Masyarakat bisa melaporkan kepada sekolah dengan mengirimkan kronologi secara *detail* beserta dokumentasi sebagai barang bukti.

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, diketahui bahwa pada tahun ini SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah melakukan pemblokiran KJP Plus kepada 3 (tiga) siswa yang melakukan pelanggaran. Sekolah kemudian melakukan pembinaan dan menghadirkan siswa beserta orang tuanya. Seluruh pihak sudah mengetahui konsekuensinya dan sekolah akhirnya melakukan pemblokiran KJP Plus ketiga siswa tersebut. Ketika sekolah memutuskan untuk memblokir KJP Plus penerima yang melakukan pelanggaran pun harus ada dasarnya, seperti berita acara pembinaan atau surat pernyataan dari siswa dan orang tua yang bersangkutan. Hal ini menjadi bukti kuat bagi pihak sekolah ketika akan melakukan proses pemblokiran dan ketika suatu saat ada hal di luar dugaan, sekolah sudah memiliki alasan yang kuat.

2) Pemantauan terhadap Penggunaan Dana

Program KJP Plus bertujuan memberikan jaminan peserta didik dari keluarga kurang mampu untuk tetap bisa menyelesaikan sekolah melalui bantuan untuk melengkapi kebutuhan sekolahnya. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bahwasanya bantuan tersebut sudah digunakan sesuai dengan peruntukannya atau belum.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan siswa dan orang tua siswa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, dulu penerima diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dana KJP Plus. Struk belanja atau nota yang didapatkan dari hasil pembelian menggunakan dana KJP Plus akan difotokopi dan dikumpulkan menyerupai klipng atau laporan untuk kemudian diserahkan kepada pihak sekolah. Pengumpulan laporan penggunaan dana sudah tidak dilakukan lagi dalam beberapa waktu terakhir, akan tetapi penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan tetap mengumpulkan struk atau nota belanja atas inisiatif masing-masing. Selain itu, diketahui bahwa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta sudah menggunakan dana bantuan sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kebutuhan dasar pendidikan dan pangan murah. Hal ini

diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Wali Kelas 8G yang menyatakan bahwa belum ada siswa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan yang diblokir bantuannya akibat tidak menggunakan dana KJP Plus sesuai dengan peruntukannya.

2. Keberhasilan Sasaran Program

Keberhasilan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta program sudah tepat dengan sasaran atau syarat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran program memungkinkan hasil dan pemanfaatan maksimal yang dapat dirasakan oleh sasaran program tersebut.

Sasaran dari program KJP Plus adalah peserta didik dari keluarga kurang mampu yang dalam hal ini pendapatan keluarga kurang memadai dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan. Secara mekanisme, saat ini tidak ada lagi pendaftaran untuk KJP Plus. Semua program bantuan sosial yang ada di DKI Jakarta, termasuk program KJP Plus menggunakan sumber data DTKS sebagai acuan dalam menerima peserta programnya. Oleh karena itu, sekolah sudah tidak bisa menentukan kelayakan bagi siswanya untuk menjadi peserta program KJP Plus atau tidak karena sekolah hanya menerima data siswa yang terdaftar DTKS melalui *website* KJP Plus sekolah. Sekolah hanya melakukan verifikasi terhadap data

siswa yang berada di website KJP Plus sekolah.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, diketahui masih ada beberapa siswa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan yang mereka anggap tidak layak mendapatkan bantuan apabila dilihat dari penampilan, gaya hidup, serta media sosialnya yang terbilang cukup mewah atau mampu. Akan tetapi, di sisi lain beberapa informan sudah merasa siswa yang menerima KJP Plus memang berasal dari keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan. Pernyataan ini didukung oleh beberapa penerima KJP Plus yang melihat bahwa teman-temannya yang menerima bantuan KJP Plus memiliki kondisi ekonomi yang sama antar satu sama lain, seperti tidak memiliki mobil dan tidak memiliki barang-barang mewah.

Berdasarkan analisis peneliti, hal ini dapat terjadi karena verifikasi yang

3. Kepuasan terhadap Program

Kepuasan merupakan hal yang dapat menentukan efektivitas suatu program, karena melalui kepuasan dapat dilihat apakah pelaksanaan program tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan manfaat kepada sasaran programnya atau tidak.

dilakukan terhadap masyarakat belum sepenuhnya menyeluruh dan mendalam. Penyebab lainnya adalah karena sekolah sudah tidak terlibat dalam penentuan penerima program. Hal ini dikarenakan meskipun penerima program ada yang tepat sasaran, tetapi ada juga yang belum tepat sasaran sebagaimana hasil wawancara di atas. Fenomena seperti ini dapat diminimalisir dengan keterlibatan pihak sekolah. Dari penelitian yang sudah peneliti lakukan, diketahui bahwa selama ini belum pernah ada siswa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan yang diblokir dengan alasan tidak layak. Akan tetapi, ada siswa dan orang tua/wali yang mengundurkan diri dengan kesadarannya sendiri karena sudah merasa mampu. Sekolah pun mewajibkan yang bersangkutan untuk membuat surat pernyataan mengundurkan diri dengan materai untuk diproses lebih lanjut.

1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pendidikan

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, mereka menyatakan bahwasanya program KJP Plus ini sangat bermanfaat dan membantu mereka, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan sekolah. Siswa dan orang tua/wali siswa selama ini menggunakan dana KJP Plus sesuai dengan yang sudah ditetapkan, yaitu untuk keperluan yang

menunjang pendidikan anak, seperti buku, alat tulis, seragam, dan lain-lain. Penerima KJP Plus merasa sangat terbantu dengan adanya program KJP Plus karena banyak sekali perlengkapan sekolah yang perlu dipenuhi, bukan hanya buku dan alat tulis, tetapi juga seragam, tas, sepatu, kacamata, bahkan alat praktik, seperti pianika, krayon, tanah liat, hingga uang saku, uang transportasi, dan lain-lain. Kemudian terpenuhinya kebutuhan sekolah dengan adanya KJP Plus ini juga berpengaruh terhadap motivasi belajar dan menjamin penerima untuk tetap bersekolah.

Saat ini, siswa dan orang tua/wali sudah merasa terjamin ketika menyekolahkan anaknya karena sekolah negeri di DKI Jakarta sudah gratis ditambah lagi untuk kebutuhan pendidikan sudah diakomodir dengan adanya program KJP Plus. Melalui data yang peneliti temukan di lapangan, program KJP Plus mampu memenuhi kebutuhan pendidikan penerimanya dan berpengaruh terhadap motivasi siswa.

2) Pemenuhan Kebutuhan melalui Pangan Murah

Diketahui bahwa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta juga menggunakan dana KJP Plus untuk membeli pangan murah yang tersedia di merchant “*Food Station*” yang terletak di Kantor Kelurahan

Pejaten Barat. Melalui hasil penelitian dengan beberapa penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan, dapat diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan melalui pangan murah ini juga sangat membantu sasaran program dalam pemenuhan gizi, terlebih siswa membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menunjang proses pembelajaran.

Dengan dana bantuan ini, peneliti juga menemukan bahwa KJP Plus bukan hanya membantu memenuhi kebutuhan pendidikan penerimanya, tapi juga membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima KJP Plus sebagaimana hasil wawancara berikut:

Berdasarkan hasil analisis peneliti, program KJP Plus bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan pendidikan penerimanya, tetapi juga membantu penerima dalam pemenuhan gizi dengan pembelanjaan pangan murah. Hal ini bahkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima KJP Plus.

3) Faktor Lain yang Melatarbelakangi Kepuasan Sasaran Program

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kepuasan terhadap program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan ternyata tidak hanya dikarenakan terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan dan kebutuhan pangan penerimanya. Ditemukan juga faktor lain yang

melatarbelakangi kepuasan penerima program KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sebagaimana yang dijelaskan berikut ini.

Penerima KJP Plus di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sudah puas dan terbantu dengan program KJP Plus. Program KJP Plus berhasil memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak, sehingga penerima tidak lagi khawatir tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terkendala biaya, apalagi sekolah negeri di DKI Jakarta sudah gratis.

Selain itu, besaran dana yang diterima oleh penerima KJP Plus selama ini juga sudah sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu Rp 300.000,00 per bulan untuk jenjang SMP negeri. Dari hasil wawancara, kesesuaiannya pencairan dana ini juga berpengaruh terhadap kepuasan penerima karena selama ini mereka tidak pernah mendapatkan saldo kurang dari yang ditetapkan atau terkena potongan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penelitian yang telah dilakukan di SMP Negeri 227 Jakarta Selatan terkait dengan efektivitas pelaksanaan program KJP Plus di sekolah tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KJP Plus sudah cukup efektif. Peneliti menggunakan 3 (tiga) indikator efektivitas oleh Campbell J. P. dalam menganalisis efektivitas

Berikutnya, peneliti juga menemukan bahwa di sekitar sekolah banyak toko-toko kebutuhan pendidikan yang menerima pembayaran menggunakan KJP Plus. Selain jaraknya yang saling berdekatan, masyarakat bisa dengan mudah mengakses fasilitas tersebut menggunakan transportasi umum berupa angkutan kota (angkot). Alasan ini juga yang melatarbelakangi kepuasan penerima terhadap program KJP Plus.

Selain itu, penerima KJP Plus juga sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan program KJP Plus itu sendiri. Sekolah dinilai informatif dan responsif jika berhubungan dengan pelaksanaan program. Pihak sekolah seperti operator KJP Plus dan wali kelas selalu siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penerima KJP Plus.

pelaksanaan program KJP Plus. Indikator tersebut terdiri dari indikator keberhasilan program yang meliputi aspek pencapaian tujuan, aspek sosialisasi program, dan aspek pemantauan program, indikator berikutnya yaitu keberhasilan sasaran program, dan yang terakhir indikator kepuasan terhadap program. Dengan demikian, program KJP Plus mampu memenuhi kebutuhan sarannya dan

memunculkan rasa aman serta menjamin masyarakat kurang mampu untuk bisa menuntaskan pendidikannya. Dengan demikian, program KJP Plus ini juga turut mendukung program wajib belajar 12 tahun.

SARAN

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta harus terus mengkaji ulang regulasi terkait dengan program KJP Plus terutama dalam upaya memastikan keberhasilan sasaran program. Sekolah sebaiknya juga diberi wewenang untuk turut serta dalam menentukan kelayakan sasaran program KJP Plus.
2. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan harus bisa lebih tegas lagi dalam menyisir dan menghimbau penerima KJP Plus.
3. SMP Negeri 227 Jakarta Selatan sebaiknya memberlakukan kembali pengumpulan laporan penggunaan dana dengan struk belanja sebagai salah satu bentuk pengendalian.

DAFTAR PUSTAKA

Anisah, A., dan Etty Soesilowati. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Efficient: Indonesian Journal Of Development Economics*, 1(1), 44–50.

<https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27218>.

Budiani, Ni Wayan. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial INPUT*, 2(1).

Campbell. (1989). *Riset dalam Efektivitas Organisasi*. (Terjemahan: Sahat Simamora). Jakarta: Erlangga.

Damanik, Jayadi dkk. (2005). *Perlindungan dan Pemenuhan Hak Atas Pendidikan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Hafrienda, R., dkk. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar pada Jenjang SMA Negeri di Kota Bukittinggi. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 14(2): 697-706.

Handayani, T., dkk. (2020). Efektivitas Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus di Sekolah Dasar Negeri Kota Administrasi Jakarta Timur. *JPD: Jurnal Pendidikan Dasar, Prosiding Seminar dan Diskusi Nasional Pendidikan Dasar 2020*.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosda.

Muluk, A. P., Irbah, A., Bagastama, R. M., & Belakang, L. (2019). *Analisis Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus di DKI Jakarta*. Ilmu Pemerintahan Unbraw.

<https://osf.io/4f8dh/download>.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

- Gubernur No. 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.
- Pertiwi, Yoane M., dan Aloysius Rengga. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada Sekolah Dasar Negeri (SD) di Jakarta Timur Wilayah II. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(3):1-14. Doi: [10.14710/jppmr.v5i3.12199](https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i3.12199).
- Strees, Richard M. (1985). *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: PPM. Erlangga.
- Sukriyadi. (2017). *Efektivitas Program Kartu Jaarta Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (Studi Kasus di Kecamatan Kebon Jeruk)*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. (2010). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.